

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN TAHUN 2019**



JAKARTA, JANUARI 2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : P. 1/PDLUK/TU/PLA.4/1/2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2019, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya perjanjian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Mengingat :
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

\5. Peraturan...

5. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDITJEN.KEU.0/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/20118 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
7. Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Nomor : SK.177/DIPA-PDLUK/12/2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2019 Satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.**

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lngkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 lingkup Direktorat Pencegahan Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disusun secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4

Peraturan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Januari 2019

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN,



Ir. ARY SUDJANTO, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong keberhasilan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 serta DIPA RKA-K/L Tahun Anggaran 2019, maka seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib membuat perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT.KEU.0/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 - 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2019 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.

Pasal 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2019.

Pasal 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon III dibawahnya dan Eselon III dengan Eselon IV dibawahnya;
- b. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan Eselon IV dibawahnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Memerintahkan Eselon II dan Eselon III serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana Pasal 3 dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Penanggung Jawab Program.
- (2) Format pernyataan dan matriks Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran II.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

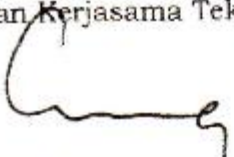
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,


ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100 % (50 Dokumen)
		Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 Persen)	100 %
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	50 Lembaga/ Instansi
2.	Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP Dengan Nilai 78 (A) di Tahun 2019	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Perkantoran 	1 Layanan

Kegiatan

Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Anggaran

Rp. 4.364.998.000,- (*Empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 670824 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENERAPAN AMDAL,UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	50 Dokumen
NSPK Harmonisasi Penilaian Dokumen Lingkungan Kegiatan Strategis Nasional	Terlaksananya NSPK Harmonisasi Penilaian Dokumen Lingkungan Kegiatan Strategis Nasional	1 Dokumen
Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Dokumen NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	1 Dokumen
Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	6 Ekoregion
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Operasional)	12 Bulan
Good Governance Kegiatan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Layanan Internal <i>Overhead</i>	<i>Terselenggaranya Layanan Internal Organisasi</i>	1 Layanan

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
 Jumlah Anggaran Rp. 2.646.268.000,- (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Tata Lingkungan



Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Kepala Subdit Penerapan AMDAL UKL-UPL dan Ijin Lingkungan,



Dra. Laksmi Widjayanti, M.Sc
 NIP. 19670824 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENERAPAN AMDAL,UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	50 Dokumen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Operasional)	12 Bulan
Good Governance Kegiatan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Layanan Internal <i>Overhead</i>	<i>Terselenggaranya Layanan Internal Organisasi</i>	1 Layanan

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
 Jumlah Anggaran Rp. 2.144.853.000,- (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2019

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
 Tata Lingkungan,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Kepala Subdit Penerapan AMDAL
 UKL-UPL dan Ijin Lingkungan,



Dra. Laksmi Widjayanti, M.Sc
 NIP. 19670824 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widhi Handoyo, SKM, M.T

Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL dan Ijin Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2001

Pihak Pertama,

Widhi Handoyo, SKM, M.T
NIP. 19740629 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENERAPAN AMDAL,UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	50 Dokumen

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Jumlah Anggaran Rp. 181.010.000,- (*Seratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Penerapan AMDAL
UKL-UPL dan Ijin Lingkungan,



Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Kepala Seksi Pemeriksaan UKL-
UPL dan Izin Lingkungan



Widhi Handoyo, SKM, M.T
NIP. 19740629 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifan Asnanto, ST, M.SI
Jabatan : Kepala Seksi Penilaian AMDAL dan Izin Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan AMDAL UKL-UPL dan Ijin Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2001

Pihak Pertama

Rifan Asnanto, ST, M.SI
NIP. 19680917 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENERAPAN AMDAL,UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin lingkungan Terlayani Sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik (100%)	50 Dokumen

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Jumlah Anggaran Rp. 268.990.000,- (*Dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Penerapan AMDAL
UKL-UPL dan Izin Lingkungan,



Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Kepala Seksi Penilaian AMDAL dan
Izin Lingkungan,



Rifan Asnanto, ST, M.SI
NIP. 19680917 199603 1 001



F. PLH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lt.6 Wing C Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5705090, Faximile (021) 5705090

SURAT PERINTAH

Nomor : PT. 1 / PDUK / TU / PEG. 3 / 11 / 2019

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

- Menimbang** : bahwa Direktorat Pencegahan Dampak lingkungan Usaha dan kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- Dasar** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMBERI PERINTAH

Kepada : Nama/NIP : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc / 19670824 199403 2 001
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disamping Tugas Pokok Saudara sehari-hari terhitung mulai tanggal, 4 Januari 2019 sampai dengan ditetapkannya Pejabat definitif yang baru;
 2. Melakukan Konsultasi dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mengenai hal-hal yang bersifat prinsip.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Januari 2019
Direktur,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP.19681011 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Pejabat Eselon III dan IV lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widhi Handoyo, SKM,M.T
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,

Widhi Handoyo, SKM,M.T
NIP. 19740629 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Irawan, SH
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Teknis
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Pihak Pertama,

Teguh Irawan, SH
NIP. 19700930 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT PENGEMBANGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	2 Ekoregion

Kegiatan Subdit. Pengembangan dan Bimtek,
Jumlah Anggaran Rp. 274.415.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus
Lima Belas Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Plt. Kepala Subdit Pengembangan
Dan Bimbingan Teknis,



Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Kepala Seksi Bimbingan Teknis,



Teguh Irawan, SH
NIP. 19700930 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tutik Sumarni, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001

Pihak Pertama,

Tutik Sumarni, S.IP
NIP. 19640609 198602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Operasional)	12 Bulan
Good Governance Kegiatan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Layanan Internal <i>Overhead</i>	<i>Terselenggaranya Layanan Internal Organisasi</i>	12 Bulan
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Fasilitas Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan Subdit Penerapan AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan
 Jumlah Anggaran Rp. 1.694.853.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Plt. Kepala Subdit Pengembangan
 Dan Bimbingan Teknis,

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
 NIP. 19670824 199403 2 001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Tutik Sumarni, S.IP
 NIP. 19640609 198602 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esther Simon, ST
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan


selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

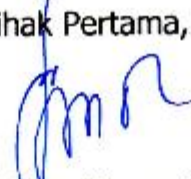
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,


Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,


Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN DATA INFORMASI

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan dan Sistem Administrasi Permohonan Ijin Lingkungan	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan dan Sistem Administrasi Permohonan Ijin Lingkungan	1 Sistem
Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	Tersedianya 1 Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	1 Sistem
Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Dokumen Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	1 Dokumen

Kegiatan Subdit. Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
 Jumlah Anggaran Rp. 1.017.900.000,- (*Satu Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
 Tata Lingkungan

Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Kepala Subdit Audit Lingkungan
 Hidup dan Data Informasi,

Esther Simon, ST
 NIP. 19671024 199610 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Mohammad, ST, M.Env
Jabatan : Kepala Seksi Audit dan Tindak Lanjut
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Esther Simon, ST
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

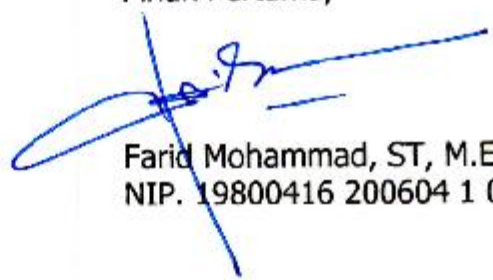
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,


Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

Pihak Pertama,


Farid Mohammad, ST, M.Env
NIP. 19800416 200604 1 017


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN DATA INFORMASI

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Dokumen Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	1 Dokumen


Kegiatan Subdit. Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
Jumlah Anggaran Rp. 275.500.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Audit Lingkungan
Hidup dan Data Informasi,


Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

Kepala Seksi Data dan Informasi,


Farid Mohammad, ST, M.Env
NIP. 19800416 200604 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Netty Mutiara, S.Hut, M.Sc
Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Esther Simon, ST
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan berusaha mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

Esther Simon, ST
NIP. 19671024 199610 2 002

Pihak Pertama,

Netty Mutiara, S.Hut, M.Sc
NIP. 19791102 200501 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN DATA INFORMASI

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Ijin Lingkungan	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Yang efektif Untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan dan Sistem Administrasi Permohonan Ijin Lingkungan	1 Sistem
Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	Tersedianya 1 Pengembangan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	1 Sistem

Kegiatan Subdit. Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
 Jumlah Anggaran Rp. 742.400.000,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)


Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Audit Lingkungan

Kepala Seksi Data dan Informasi,

Hidup dan Data Informasi,




 Esther Simon, ST
 NIP. 19671024 199610 2 002

Netty Mutiara, S.Hut, M.Sc
 NIP. 19791102 200501 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT EVALUASI KINERJA SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penyusunan Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP	Tersedianya Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP	1 Laporan
Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	50 Lembaga/Instansi
Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah Serta penyusunan AMDAL oleh perorangan dan LPJP	1 Laporan

Kegiatan Subdit. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,
 Jumlah Anggaran Rp700.830.000,- (*Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Tata Lingkungan,

Ir. Ary Sudjanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Kepala Subdit Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,

Ir. Neni Supreni, M.Si
 NIP. 19640114 199203 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sri Muljani Sutjipto
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Ir. Ary Sudijanto, M.SE.
NIP. 19681011 199403 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Sri Muljani Sutjipto
NIP. 19610926 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT EVALUASI KINERJA SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penyusunan Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP	Tersedianya Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP	1 Laporan
Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah serta Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	50 Lembaga/Instansi
Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah Serta penyusunan AMDAL oleh perorangan dan LPJP	1 Laporan

Kegiatan Subdit. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,
 Jumlah Anggaran Rp700.830.000,- (*Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Jakarta, Februari 2019

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Usaha dan Kegiatan,
 Tata Lingkungan,



Ir. Ary Sudijanto, M.SE
 NIP. 19681011 199403 1 001

Kepala Subdit Evaluasi Kinerja
 Sistem Kajian Dampak Lingkungan,



Ir. Sri Muljani Sutjipto
 NIP. 19610926 198903 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sampe Hasoloan Simanungkalit, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Komisi Penilaian AMDAL dan
Pemeriksa UKL-UPL Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian
Dampak Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001


Sampe Hasoloan S, S.Kom, MM
NIP. 19700502 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT EVALUASI KINERJA SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

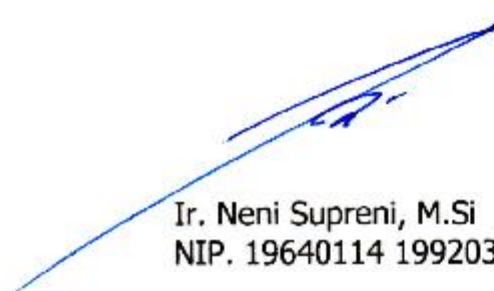
Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penyusunan Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah dan LPJP	Tersedianya Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL	1 Laporan
Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah	50 Lembaga/Instansi
Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan hasil pembinaan dan evaluasi kinerja KPA AMDAL daerah dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah	1 Laporan

Kegiatan Subdit. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,
 Jumlah Anggaran Rp350.415.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Evaluasi Kinerja
 Sistem Kajian Dampak Lingkungan,

Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Komisi
 Penilaian AMDAL dan Pemeriksa
 UKL-UPL Daerah


 Ir. Neni Supreni, M.Si
 NIP. 19640114 199203 2 001


 Sampe Hasoloan S, S.Kom, MM
 NIP. 19700502 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Indra Windardi, ST
Jabatan : Kepala Seksi Kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL
Perorangan dan LPJP

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Neni Supreni, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian
Dampak Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. Neni Supreni, M.Si
NIP. 19640114 199203 2 001


Nugroho Indra Windardi, ST
NIP. 19720714 20003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN
SUBDIT EVALUASI KINERJA SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN


Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Penyusunan Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	Tersedianya Juknis/Juklak sistem pembinaan dan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL perorangan dan LPJP	1 Laporan
Pembinaan dan Evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP	50 Lembaga/Instansi
Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan hasil Pembinaan dan evaluasi kinerja penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	1 Laporan

Kegiatan Subdit. Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan,
 Jumlah Anggaran Rp350.415.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)


Jakarta, Januari 2019

Kepala Subdit Evaluasi Kinerja
 Sistem Kajian Dampak Lingkungan,

Kepala Seksi Kinerja Penyusunan
 AMDAL Perorangan dan LPJP.



Ir. Neni Supreni, M.Si
 NIP. 19640114 199203 2 001



Nugroho Indra Windardi, ST
 NIP. 19720714 20003 1 001